

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan hukum. Hal ini berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Negara juga wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dari situ dapat dilihat bahwa penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara, setiap penyelenggaraan negara, setiap lembaga kenegaraan, dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah.

Begitu pula dalam kehidupan manusia di masyarakat baik sebagai pribadi maupun sebagai kolektivitas, senantiasa berhubungan dengan nilai-nilai budaya, hukum dan norma serta moral. Kehidupan masyarakat dimana pun tumbuh dan berkembang dalam ruang lingkup interaksi nilai dan moral yang memberi motivasi dan arah sekalian anggota masyarakat untuk berbuat, bertindak dan bersikap. Nilai dan norma adalah sesuatu yang berharga, yang berguna, yang indah, yang memperkaya batin, yang menyadarkan manusia akan harkat dan martabat secara universal. Nilai dan norma bersumber pada budi yang berfungsi mendorong, mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai dan norma sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan, di samping sistem sosial dan budaya. Nilai dan norma yang dianut dituangkan dalam sebuah produk hukum berupa undang-undang tertulis.

Nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang menjadi sumber moral dan menjelma dalam wujud aneka ragam kebudayaan daerah, dapat dikembangkan dalam mewujudkan hak dan kewajiban sosial khususnya dalam kerangka hukum, yang menjadi patokan dalam berinteraksi. Sumber-sumber perumusan dalam produk hukum berasal dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam kehidupan sosial bangsa. Nilai-nilai itu tampil sebagai norma dan moral kehidupan yang ditempa dan dimatangkan oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia untuk membentuk dirinya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, nilai-nilai menjadi sumber inspirasi dan cita-cita untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hak dan kewajiban, dua kata itu tak terpisahkan satu sama lain. Pemenuhan hak meniscayakan kewajiban, sedangkan pelaksanaan kewajiban mengindikasikan adanya hak. Hak seseorang adalah kewajiban bagi orang lain, begitu pula sebaliknya. Masing-masing memiliki tanggung jawab nyata untuk melihat apa tugas dan kemudian melaksanakannya. Tugas kerangka hukum adalah menyeimbangkan hak dan kewajiban antar individu agar tidak ada individu yang merasa terampas haknya dan tidak ada individu yang merasa benar telah merampas hak orang lain. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui adanya permasalahan tentang bagaimanakah pengetahuan masyarakat di bidang hukum yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat untuk taat pada hukum baik sebagai pribadi maupun kelompok (organisasi).

Seperti diketahui kesadaran hukum masyarakat dewasa ini semakin menipis. Melalui media dapat disaksikan para pejabat atau pemimpin yang seharusnya dapat dijadikan contoh, justru banyak yang menjadi tersangka korupsi dan kemudian diadili. Para pemimpin lainnya sibuk memainkan kata-kata untuk bersembunyi dari tanggung jawab atas perbuatannya. Tidak ada kesamaan antara kata-kata dan perbuatan yang dilakukannya. Hal ini menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda. Sudah bukan rahasia lagi bahwa di lembaga pendidikan, dapat dijumpai perilaku tidak jujur yang dilakukan individu di sekolah. Mulai dari

siswa yang menyontek, sering alasan tidak masuk kelas, sering telat masuk kelas, alasan tidak mengerjakan PR dan lain-lain. Dari permasalahan tersebut, apabila tertanam sejak dini akan tumbuh generasi bangsa yang korup.

Korupsi adalah bahaya laten bagi bangsa dan negeri ini. Ibarat kanker, korupsi menyebar ke seluruh lapisan masyarakat dan menggerogoti ketahanan negara. Praktik korupsi dimulai dari level terendah hingga yang level pimpinan. Bentuknya bisa suap dan pungutan liar, persekongkolan dan manipulasi uang negara, hingga penyalahgunaan wewenang dalam suatu jabatan. Korupsi memiliki akibat atau dampak negatif yang cukup besar. Korupsi dapat menghancurkan efektivitas potensial semua program pemerintah, dapat mengganggu/menghambat pembangunan dan menimbulkan korban individual dan kelompok. Korupsi juga dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik.

Upaya untuk meminimalkan praktik korupsi ini adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dapat dimulai sejak dari bangku sekolah yaitu dengan menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum. Ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan pendidik saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat secara umum. Untuk pengembangan pendidikan kesadaran hukum di persekolahan mata pelajaran PPKn dan mata pelajaran agama merupakan ujung tombak. Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) antara lain ada ketentuan bahwa kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

PPKn memiliki misi sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan moral/karakter. Sebagai pendidikan demokrasi, esensinya misi PPKn untuk meningkatkan kemampuan partisipasi warga Negara dalam mengembangkan dan memelihara system politik demokrasi Pancasila. Sedangkan sebagai pendidikan hukum misi PPKn adalah mewujudkan warga Negara yang memiliki kesadaran hukum. Selanjutnya sebagai pendidikan karakter misi PPKn adalah membentuk warga Negara yang memiliki sikap dan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan yang berlaku dalam kehidupan masyarakatnya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki visi sebagai *nation and character building*. Yakni membangun karakter manusia Indonesia yang Pancasilais, karena ideologi Pancasila merupakan identitas bagi bangsa Indonesia. Selain berdimensi identitas, Pancasila juga berdimensi humanitas (sila kedua dan keempat) dan universalitas (sila pertama dan keempat) (Cholisiin,2010: 1).

PPKn sebagai pendidikan hukum dimaksudkan adalah pendidikan hukum dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Konsekuensi PPKn sebagai pendidikan politik, hukum dan moral/karakter, maka kemampuan berpartisipasi secara bertanggung jawab bagi warga negara harus sejalan dengan peraturan hukum dan norma moral yang berlaku dalam masyarakatnya. Tanggung jawab warga negara (*citizen responsibility/civic responsibilities*) menurut CCE (1994 :37) antara lain dapat dicontohkan: melaksanakan aturan hukum; menghargai hak orang lain; memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya; melakukan kontrol terhadap para pemimpin yang dipilihnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya; melakukan komunikasi dengan para wakil di sekolah, pemerintah lokal, pemerintah nasional; memberikan suara dalam suatu pemilihan; membayar pajak; menjadi saksi di pengadilan; serta bersedia untuk mengikuti wajib militer, dan sebagainya.

Pendidikan hukum dapat menggunakan berbagai media untuk pendidikan kesadaran hukum anti korupsi. Salah satunya melalui media film. Media film selain mengandung unsur hiburan juga mengandung unsur pendidikan yang menyampaikan pesan-pesan moral seperti : kejujuran, keteguhan, toleransi,

kebijaksanaan, kesabaran dan sebagainya. Artinya film sebagai media hiburan dan tontonan namun juga sebagai tuntunan yang membawa pesan sebuah nilai-nilai kesadaran hukum bagi generasi muda.

Film "Kita Versus Korupsi" adalah sebuah film yang menceritakan mengenai berbagai hal yang menyinggung mengenai tindak kasus korupsi, sebuah penyakit sosial dan hukum yang saat ini sedang mewabah dengan begitu hebatnya di kalangan masyarakat Indonesia. Empat film pendek yang ada dalam satuan Kita Versus Korupsi lebih ingin menunjukkan bagaimana sebenarnya sebuah tindakan korupsi sebenarnya dapat berada di berbagai sudut kehidupan keseharian penontonnya. Kumpulan 4 film pendek yang merupakan program kampanye anti korupsi antara lain: 1) Rumah Perkara; 2) Aku padamu; 3) Selamat Siang Risal; 4) Psssttt... Jangan Bilang Siapa-Siapa. Dengan rangkaian cerita yang sederhana, namun disajikan dengan begitu kuat, kualitas teknis yang tidak mengecewakan sekaligus didukung dengan penampilan para pemeran yang mampu menghidupkan setiap karakter yang diperankan, Kita Versus Korupsi adalah film yang sarat dengan pesan-pesan moral kejujuran dan anti korupsi. Pesan tersebut merupakan ideologi yang terkonstruksi dalam isi film "Kita Versus Korupsi". Melalui film ini juga, generasi muda bangsa diharapkan dapat belajar nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan hukum.

Berdasarkan paparan di atas, penulis melakukan pengkajian dalam bentuk penelitian yang berjudul: "Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Dalam Film "Kita Versus Korupsi" (Analisis Semiotik dalam Perspektif PPKn)."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Perilaku korup telah memasuki hampir seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia. Kasus-kasus korupsi menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda.

2. Upaya meminimalkan perilaku korup di antaranya dengan memberikan pendidikan kesadaran hukum bagi seluruh warga negara
3. Masyarakat memiliki tanggung jawab dalam pendidikan generasi muda. Masyarakat dapat memberikan contoh perilaku yang sadar hukum di antaranya melalui media film.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah film "Kita Versus Korupsi" memiliki nilai pendidikan kesadaran hukum?
2. Bagaimanakah muatan nilai-nilai kesadaran hukum yang ada dalam film "Kita Versus Korupsi" ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan bahwa film "Kita Versus Korupsi" memiliki nilai pendidikan kesadaran hukum
2. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai kesadaran hukum yang ada dalam film "Kita Versus Korupsi"

E. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan kesadaran hukum bagi warga negara
 - b. Menambah pengetahuan khususnya mengenai wacana pendidikan kesadaran hukum pada siswa melalui media film
2. Manfaat atau Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan masukan dan informasi yang berguna bagi mahasiswa terhadap pendidikan kesadaran hukum melalui media film

- b. Memberi sumbangan pengetahuan dan informasi kepada mahasiswa maupun masyarakat mengenai pentingnya pendidikan kesadaran hukum.

F. Daftar Istilah

1. Hukum adalah kristalisasi nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum tiada lain adalah penjelmaan nilai masyarakat tentang kesepakatan hidup bersama
2. Kesadaran hukum adalah seluruh kompleks kesediaan warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh hukum. Kesadaran hukum akan memotivasi warga masyarakat untuk secara suka rela menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum perundang-undangan negara yang berlaku.
3. Semiotika adalah studi tentang pertandaan dan makna dari sistem tanda; ilmu tentang tanda, tentang bagaimana makna dibangun dalam “teks” media; atau studi tentang bagaimana tanda dari jenis karya apapun dalam masyarakat yang mengkomunikasikan makna.